

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG, 2005-2007

Oleh:
Istiqomah¹⁾ dan Ratno Purnomo²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Monitoring and evaluation (monev) are important to analyze the achievement goal through many activities so corrective policies should be done immediately. This research evaluates the government performance of Pemalang regency using 117 indicators based on PP No.6/2008. Some data SKPD are displayed from 2005 until 2007. However, data used to compare indicator among regencies are only displayed in 2006. This research recommend which indicators are good and which ones are necessary to accelerate.

Keywords: monitoring, evaluation, otonomy

PENDAHULUAN

Untuk mengetahui realisasi agenda pembangunan diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Secara ideal kegiatan monitoring dan evaluasi harus menjadi bagian integral dalam setiap organisasi pemerintah dan dalam siklus sebuah program. Hanya dengan melakukan monitoring dan evaluasi, organisasi pemerintah bisa mendapatkan peringatan dini untuk perbaikan awal dan umpan balik untuk peningkatan kinerja saat ini dan menjadi *lesson learned* untuk kinerja masa datang. Apabila monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara berkelanjutan, maka pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.

Salah satu aspek penting dalam monitoring dan evaluasi adalah pengukuran kinerja. Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja dilakukan terhadap realisasi perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Pengukuran kinerja pemerintah daerah, khususnya untuk daerah yang sudah berotonomi seperti Kabupaten Pemalang, dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif bagi daerah untuk waktu lima tahun.

Tindak lanjut sesuai dengan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyusun RPJMD untuk jangka waktu tahun 2006-2011. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006. Dengan demikian, sampai dengan saat ini, RPJMD Kabupaten Pemalang telah berjalan selama 2 tahun atau sudah hampir setengah jalan. Oleh karena itu diperlukan studi monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD selama dua tahun tersebut.

Namun demikian, sampai saat ini studi yang dilakukan baru sebatas penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi saja sedangkan studi monitoring dan evaluasi itu sendiri belum dilakukan dengan mempertimbangkan indikator-indikator kunci keberhasilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi dengan menggunakan indikator kunci yang meliputi 3 aspek yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi ukuran realisasi program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006 dan 2007 berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008.
2. Identifikasi program pembangunan yang perlu diakselerasi pada tahun selanjutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan tahun 2006 dan 2007.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan indikator-indikator kunci keberhasilan. Indikator kunci keberhasilan tersebut meliputi 3 aspek, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai SKPD di Kabupaten Pemalang dan beragam publikasi statistik di Badan Pusat Statistik Pemalang dan Semarang serta Bank Indonesia Semarang. Untuk jenis data yang sama, seringkali terjadi inkonsistensi data antarsumber, sehingga dalam hal ini untuk tujuan penyusunan perbandingan dan pemeringkatan, peneliti menggunakan data dari sumber yang sama.

Inkonsistensi data yang mestinya berasal dari sumber yang sama barangkali bisa diminimalkan dengan cara sebelum publikasi dicetak dan diedarkan untuk publik, dilakukan cek ulang dengan cara dikirimkan kembali dalam bentuk *soft* atau *hard copy* kepada penyedia data pertama. Setelah mendapatkan persetujuan dari penyedia data pertama, baru dipublikasikan.

Peringkat tertinggi yang dicapai Kabupaten Pemalang yaitu posisi 6 pada tahun 2006 untuk indikator angka kriminalitas, sedangkan peringkat terbawah (35) ditemukan untuk indikator 1) ketersediaan SLTP, 2) ketersediaan SLTA, 2) rasio guru murid SLTP (ketiganya untuk tahun 2005), 4) rasio puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling (2005 dan 2006), dan 5) persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Indikator-indikator pembangunan tersebut berbeda-beda sifatnya, ada yang bisa diperbaiki dalam jangka pendek, ada juga yang hanya bisa ditingkatkan dalam jangka panjang. Ada indikator yang bersifat tunggal, ada juga yang merupakan hasil dari berbagai kebijakan lintas SKPD. Termasuk dalam kategori jangka panjang adalah persentase penduduk diatas garis kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan PDRB dan persentase penduduk yang bekerja merupakan hasil dari berbagai kebijakan lintas bidang.

Pertumbuhan PDRB sempat melambat dari 4,05% (2005) ke 3,72% (2006), tapi kemudian mengalami kenaikan menjadi 4,47% (2007). Melambatnya pertumbuhan pada 2006 diduga berhubungan dengan menurunnya nilai tambah perusahaan besar dan sedang, walaupun nilai investasinya naik. Kenaikan nilai investasi yang tidak disertai kenaikan nilai tambah mungkin dikarenakan investasi tersebut memerlukan waktu untuk

menghasilkan nilai tambah. Kemungkinan lain adalah naiknya biaya produksi sehingga menekan margin yang didapat.

Daya serap tenaga kerja per perusahaan besar dan sedang turun dari 67 tenaga kerja per perusahaan (2005) menjadi 62 (2006). Dengan demikian ada indikasi bahwa investasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2006 relatif lebih padat modal dibandingkan tahun 2005. Menurut Susenas, rasio penduduk yang bekerja juga turun dari 0,93 ke 0,89 selama 2005-2006, artinya jumlah pengangguran bertambah.

Rendahnya persentase perempuan yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta (kurang dari 2%) menunjukkan bahwa banyak perempuan di Kabupaten Pemalang bekerja di sektor informal. Untuk itu, pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi informal lebih tepat.

Rendahnya peringkat Kabupaten Pemalang dalam indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik – walaupun sudah mencapai 97,93% – dan seringnya pemadaman listrik, berimplikasi pada perlunya upaya untuk menggunakan energi alternatif, misalnya arus sungai atau pemanfaatan sampah dan tinja. Pemanfaatan sumber energi yang terakhir sekaligus juga mengatasi rendahnya persentase rumah tinggal bersanitasi yang masih 61%.

Tentang indikator pendidikan, argumentasi Mustasya (2004) patut disimak. Menurut Mustasya, pendidikan tidak serta merta memutus lingkaran setan kemiskinan karena peran pendidikan dalam pemberantasan kemiskinan sangat tergantung pada jenis pelayanan pendidikan dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Selain itu ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi tingkat pendapatan seperti akses terhadap berbagai kebutuhan dan kekayaan yang sering terkait warisan orang tua. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah, ketersediaan sekolah, dan rasio guru murid harus disertai kebijakan mengaitkan pendidikan dengan pasar tenaga kerja dan kewirausahaan dan berbasis potensi lokal. Fourie (2007) berdasarkan studinya di Afrika Selatan berpendapat bahwa peningkatan pendidikan – dalam bentuk anggaran pemerintah yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas pengajaran – dan khususnya kualitas output, akan secara dramatis meningkatkan kondisi sosial ekonomi.

Banyak penelitian yang menemukan sekolah-sekolah berprestasi tinggi walaupun lingkungan masyarakatnya miskin. Studi tersebut antara lain dilakukan oleh Mulford *et al.* (2007). Karakteristik umum dari sekolah-sekolah tersebut adalah kepemimpinan yang berhasil dan berprestasi tinggi. Temuan mereka - hasil studi terhadap sekolah-sekolah di Tasmania, Australia - mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa kepemimpinan kepala sekolah di sekolah-

sekolah berprestasi walaupun berada di lingkungan masyarakat miskin mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Pembelajar yang hebat dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru
2. Selalu bekerja demi pencapaian akademik yang tinggi
3. Berinvestasi terutama dalam membangun hubungan dan kerjasama
4. Memberikan dukungan yang tinggi kepada staf
5. Memperkuat keterlibatan dan minat masyarakat
6. Memperbaiki lingkungan fisik
7. Memperoleh *grant* atau fokus pada sistem untuk memperoleh sumberdaya lebih besar
8. Jam kerja lama
9. Memperoleh dukungan dari pemerintah setempat.

Tentang hubungan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pendidikan, Ismail (2000) berdasarkan studinya di Malaysia menemukan bahwa hubungan antara pendidikan dan pemerataan pendapatan signifikan. Artinya, peningkatan pendidikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Pendidikan berperan penting untuk meningkatkan pendapatan dan menghindarkan kemiskinan. Oleh karena itu pendidikan harus ditekankan dalam strategi pemberantasan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Sehubungan dengan temuan tersebut, Ismail merekomendasikan bahwa harus ada jaminan bahwa orang akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik setelah menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karenanya akses ke pasar kerja menjadi penting dan segala jenis distorsi seperti diskriminasi dan informasi yang tidak sempurna harus dihilangkan. Lebih lanjut Ismail menyatakan bahwa transformasi ekonomi dari pertanian ke industri menyebabkan perbedaan upah yang lebar antara kedua sektor tersebut. Untuk meminimumkan perbedaan tersebut, program pembangunan pedesaan termasuk peningkatan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan upah.

Hasil penelitian di Kenya bisa menjadi bahan rujukan tentang kebijakan seperti apa yang harus diambil untuk meningkatkan pendidikan. Menurut Ngware *et al.* (2006), lebih dari 75% penduduk berusia pendidikan menengah di Kenya tidak punya akses ke sekolah menengah (di Kabupaten Pemalang sekitar 45%). Tingkat partisipasi yang rendah tersebut antara lain disebabkan tingkat transisi (jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi) yang rendah, biaya pendidikan dan terbatasnya kapasitas sekolah menengah. Sedangkan keputusan rumah tangga untuk mengirimkan anaknya ke jenjang sekolah menengah ditentukan oleh karakteristik sosial ekonomi seperti tingkat pendapatan, jenis kelamin dan pendidikan kepala keluarga, lokasi rumah-tangga (desa-kota), jenis kelamin anak, umur siswa dan biaya pendidikan menengah. Lebih lanjut

Ngware *et al.* merekomendasikan agar peningkatan partisipasi sekolah menengah mengadopsi komposisi kebijakan strategis yang tepat berdasarkan ukuran-ukuran pertukaran (*trade off*) dan efisiensi yang sesuai. Mereka juga merekomendasikan agar kesenjangan wilayah dan gender sebaiknya dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan.

Penelitian ini juga menemukan kaitan antara penurunan jumlah akseptor KB, kenaikan rata-rata jumlah anak dan meningkatnya rasio ketergantungan. Ekonom Harvard David Bloom dan David Canning berargumen bahwa setidaknya 1/3 kesuksesan ekonomi suatu negara tergantung pada rasio ketergantungannya. Oleh karena itu pengendalian jumlah penduduk perlu diinternalisasi kepada masyarakat. Menurut Da Silva (2008), berdasarkan hasil penelitiannya di Sri Lanka, dalam rangka pemberantasan kemiskinan, upaya yang harus dilakukan yaitu serangkaian kebijakan yang super pro rakyat miskin, seperti peningkatan pendidikan, program keluarga berencana yang efektif untuk menurunkan angka kelahiran dan rasio ketergantungan, dan memberikan prioritas pada kelompok tertentu (anak-anak, orang tua, wilayah perdesaan, dan rumah tangga yang dikepalai perempuan) dalam intervensi yang ditargetkan.

Kabupaten Pemalang menempati posisi terakhir dalam rasio puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Oleh karenanya perlu perhatian khusus untuk penambahan fasilitas kesehatan tersebut.

Selain yang sudah disebutkan diatas, indikator-indikator yang memerlukan perhatian yaitu:

1. Salah satu indikator kemiskinan yaitu rumah berlantai tanah masih cukup besar di Pemalang (26,3%).
2. Luas bangunan ber-IMB pada tahun 2006 hanya 0,0041%.
3. Jumlah koperasi aktif menurun walaupun jumlahnya naik, sehingga perlu studi lebih lanjut tentang penyebab ketidakaktifan tersebut.
4. Jumlah penduduk ber-KTP 0,75, masih tersisa 25%.
5. Sengketa pengusaha-pekerja naik dari 10,8 per 1.000 perusahaan menjadi 28, 1.
6. Perpustakaan kurang terdokumentasi, padahal jumlahnya tercatat ada 78. Berdasarkan pengalaman perpustakaan publik di Amerika Serikat, sebenarnya perpustakaan bisa berperan jauh lebih banyak daripada sekedar sebagai tempat meminjam buku. Perpustakaan bisa berfungsi sebagai pusat pendidikan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.
7. Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan kurang terdokumentasi. Sedemikian sulit untuk mengakses data yang berhubungan dengan kegiatan pemuda dan olahraga. Sehubungan dengan kegiatan di bidang ini, refleksi Irwan

Prayitno (2008) patut dipertimbangkan terutama tentang pencarian bakat dan pembinaan. Jangan sampai ada pemuda-pemuda terbaik yang tidak memperoleh dukungan sebagaimana mestinya.

8. Pelanggan PDAM terus menurun dari 6,2 per 100 rumah tangga ke 5,8 dan 5,5. Namun, persentase penduduk berakses air minum mengalami kenaikan dari 97,69 menjadi 99,88 pada 2005-2006. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun PDAM menghadapi kendala dalam mengembangkan kapasitasnya, namun penduduk di Kabupaten Pemalang memiliki alternatif sumber air minum yang lain.

Indikator-indikator di bawah ini menggembirakan, tetapi sebaiknya terus ditingkatkan:

1. Rata-rata kelompok binaan LPM naik dari 5 menjadi 7 (2006-2007).
2. Peringkat angka kriminalitas naik dari peringkat 11 ke 6.
3. Lulusan S1/S2/S3 naik dari 40,26 per 10.000 menjadi 139,71 naik dari 35 ke 18. Tetapi, naiknya persentase penduduk berpendidikan tinggi tanpa disertai ketersediaan lapangan kerja yang sesuai atau dibekali jiwa kewirausahaan yang memadai juga bisa menciptakan masalah pengangguran terdidik. Di sisi lain, para sarjana baru juga bisa dimanfaatkan sebagai motor pembangunan. Dengan penambahan para sarjana baru, SKPD terkait dapat menyelenggarakan kegiatan yang langsung ditargetkan untuk mereka baik untuk penyediaan lapangan kerja maupun sebagai pelopor pembangunan, misalnya menjadi fasilitator di Lembaga Pemberdayaan Desa.
4. Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan naik pesat dari 37% ke 59%, padahal pada periode yang sama persentase tersebut di Jawa Tengah hanya naik dari 43% ke 53%. Kenaikan ini melambangkan membaiknya kesejahteraan penduduk. Tapi ketika kenaikan itu bersamaan terjadinya dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, bertambahnya pengangguran, dan menurunnya daya serap tenaga kerja oleh perusahaan besar dan sedang, kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non pangan yang sangat tinggi tersebut mengundang tanya bagaimana konsumsi tersebut didanai. Data pembandingan dari Bappeda Pemalang menyatakan bahwa persentase konsumsi untuk non pangan pada tahun 2006 adalah 39,5%. Angka ini lebih konsisten dengan data lain.

Sehubungan dengan usaha Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang sejahtera, upaya-upaya pemberantasan kemiskinan secara terpadu di Bangladesh sangat menarik dicermati (Khan, 2000).

Di sebuah negara seperti Bangladesh, sebagaimana Indonesia, tidak mungkin bagi pemerintah dengan anggarannya yang terbatas untuk menjangkau semua orang miskin. Situasi ini di Bangladesh menjadi lebih sulit ketika terjadi banjir atau angin puting beliung. Untuk membantu upaya pemerintah, Gram Bangla Sastha mengembangkan institusi model Pendekatan Terpadu untuk Pemberantasan Kemiskinan dan Kemandirian Berbasis Komunitas melalui pembangunan sosial ekonomi dan aktivitas kesejahteraan. Wilayah yang dipilih yaitu Kanchanpur di distrik Tangail. Kanchanpur terletak di bagian tengah Bangladesh dengan luas wilayah 40 km² dan 35.000 penduduk. Wilayah ini merupakan dataran rendah, terkena banjir setiap tahun dan angin puting beliung beberapa kali dalam setahun. Sebagian besar penduduk tidak punya tanah dan aset dan hidup jauh di bawah level subsisten. Sebagian besar juga buta huruf. Mereka tidak berpendapatan tetap dan hanya bekerja musiman. Tingkat kematian bayi sangat tinggi. Sebagian besar juga tidak punya toilet yang sehat sehingga polusi lingkungan umum dijumpai. Angka harapan hidup di Kanchanpur kurang dari 50 tahun.

Aktivitas yang dilakukan dalam rangka pemberantasan kemiskinan dan membangun kemandirian meliputi :

1. Pendidikan komunitas, meliputi pendidikan anak usia 3-5 tahun, tutorial anak-anak SD untuk menurunkan angka *drop out*, dan pendidikan ibu muda, yang pada gilirannya akan dapat mengajar anak-anaknya.
2. Pelatihan komunitas : mengetik, menjahit, membordir dan produksi ternak.
3. Pelayanan kesehatan komunitas : disediakan sebuah klinik kesehatan dan rumah sakit komunitas dengan 20 tempat tidur.
4. Penyediaan air komunitas : 600 sumur pompa dibangun dengan kedalaman 30 meter karena penyebab kematian utama di wilayah ini adalah air yang tercemar.
5. Sanitasi komunitas : dibangun 100 toilet dengan kapasitas masing-masing untuk 10 orang selama 10 tahun karena kebanyakan penduduk miskin buang hajat diatas tanah yang menimbulkan polusi, lebih buruk lagi pada waktu banjir.
6. Peningkatan pendapatan komunitas:
 - a. Bagi hasil ternak : Gram Bangla menyediakan sapi, kambing, domba, ayam, atau bebek tergantung permintaan. Untuk sapi, pedetnya dipelihara dan dijual; keuntungannya dibagi 2 antara keluarga yang merawat dan Gram Bangla, sedangkan induknya tetap menjadi milik Gram Bangla. Untuk ayam dan bebek, keluarga yang merawat wajib mengembalikan 6 ekor anak ayam untuk

- tiap ekor ayam atau bebek yang dipinjamkan Gram Bangla.
- b. Pinjaman tanpa bunga : keluarga miskin yang ingin memulai bisnis tapi tidak punya modal, diberikan pinjaman dalam jumlah kecil. Pinjaman tersebut wajib dikembalikan dalam waktu 100 hari. Pengembalian boleh memilih harian atau mingguan. Tidak ada bunga dan tak ada biaya apapun. Margin bisnis mereka antara 10%-30%, sehingga mengembalikan dalam 100 hari bukan masalah bagi mereka. Sistem ini memungkinkan keluarga yang tidak punya aset menjadi mandiri.
 - c. Koperasi petani : produksi padi hanya 2 ton per hektar, dibandingkan dengan Jepang yang rata-rata 8 ton. Melalui koperasi ini petani dibantu dalam instalasi sumur pompa untuk irigasi, penggunaan varietas berhasil tinggi, pemupukan, penggunaan pestisida, teknik membajak modern, penyimpanan dan pemasaran produk. Alhasil, produksi meningkat hampir dua kali lipat. Selain itu, diperkenalkan pola tanam baru sedemikian rupa sehingga tidak perlu bertanam di waktu banjir dan tetap bisa bertanam di musim kemarau dengan irigasi.
 - d. Koperasi simpanan : tiap anggota menyimpan sedikitnya 5 Taka per minggu. Modal koperasi diinvestasikan dalam apotek rumah sakit Gram Bangla, dengan bagi porsi bagi hasil 50:50 untuk rumah sakit dan untuk anggota koperasi. Sedang dirancang pula koperasi pusat perbelanjaan. Anggota yang berbelanja disini memperoleh rabat 5%.
7. Penanaman pohon komunitas : banyak keluarga miskin menghadapi kesulitan saat menikahkan anaknya. Oleh karena itu ketika mereka punya anak, mereka disarankan menanam pohon, yang ditebang saat anak tersebut menikah. Mereka juga didorong untuk menanam pohon buah sehingga ada manfaat ganda yang diperoleh : selain buah, juga konservasi lingkungan.
 8. Tungku komunitas : tungku tradisional Bangladesh tidak efisien, banyak panas yang terbuang. Oleh karena itu diadopsi model tungku Cina yang hemat energi. Walaupun sama-sama menggunakan kayu bakar, kompor Bangladesh membutuhkan 2,5 jam untuk memasak nasi, sup dan kari, sedangkan tungku model Cina hanya perlu 40 menit.
 9. Mitigasi bencana komunitas : sebagai model tanah dinaikkan 1 meter lebih tinggi daripada ketinggian banjir. Wilayah ini sebagai tempat berlindung ketika terjadi banjir dan bencana lain. Penduduk diajarkan cara mempersiapkan diri, menghadapi bencana, bagaimana menghadapinya dan rehabilitasi.
 10. Aktivitas budaya komunitas : olahraga, permainan, aktivitas budaya, kompetisi seni, dll. Gram Bangla menyediakan peralatan yang diperlukan, merancang perlombaan dan membagikan hadiah.
 11. Riset yang mendukung komunitas : para peneliti dari dalam dan luar negeri dipersilakan untuk meneliti tentang pendekatan terpadu untuk pemberantasan kemiskinan dan kemandirian.
 12. Pembangkitan kepedulian komunitas : orang-orang miskin tidak punya banyak mimpi dan dinamika; mereka menerima kemiskinan sebagai nasib buruk atau takdir Tuhan. Jadi mereka perlu dimotivasi bahwa tiap orang punya potensi untuk mandiri. Menurut Khan, sangat sulit membangkitkan kepedulian ini.
 13. Kerjasama dengan lembaga pemerintah lokal.
- Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap 32 negara berkembang, Dao (2004) menyimpulkan sebagai berikut:
1. Untuk memberantas kemiskinan di negara berkembang, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan atau konsumsi 10% penduduk termiskin. Oleh karena itu setiap upaya pemerintah untuk redistribusi pendapatan untuk segmen termiskin akan berguna dalam menurunkan kemiskinan di perdesaan.
 2. Karena penyebab kemiskinan di perdesaan negara berkembang adalah kelangkaan sumber-sumber ekonomi seperti modal fisik dan modal manusia (dalam bentuk pelatihan), yang membantu peningkatan produktivitas pertanian, pemerintah semestinya meningkatkan modal fisik dan modal manusia untuk mereka yang bekerja di sektor pertanian.
 3. Studi mereka menunjukkan bahwa peningkatan status perempuan secara umum, dan status perempuan perdesaan secara khusus, akan meningkatkan standar hidup mereka. Usaha pemerintah untuk menurunkan angka kelahiran dan angka melek huruf perempuan akan membantu memutus lingkaran setan kemiskinan.
 4. Di negara berkembang yang multi-etnik, pemerintah harus menjamin bahwa kelompok minoritas tidak didiskriminasi dalam memperoleh akses ke kredit perdesaan, dan kesempatan pendidikan/pelatihan.
 5. Bila wilayah perdesaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan wisata, pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur sambil mendorong sektor swasta untuk menyediakan layanan wisata melalui keringanan pajak. Bentuk jasa dalam era perdagangan bebas ini khususnya penting dalam kasus negara-negara kecil dengan pasar yang kecil di perdesaan.
 6. Bantuan pemerintah dalam irigasi diperlukan untuk menurunkan kemiskinan di perdesaan.

Penelitian Ghosh (2002) menemukan bahwa kesenjangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di India disebabkan karena pendapatan di perdesaan tumbuh dengan kecepatan yang lebih rendah, sehingga jauh ketinggalan daripada di perkotaan. Alasan utama dikotomi sektoral ini adalah karena strategi pembangunan India yang sangat bias perkotaan. Alokasi investasi India, yang menjadi basis pembentukan pendapatan, tidak didasarkan pada kriteria efisiensi karena lebih banyak sumberdaya terkonsentrasi di perkotaan yang memiliki rasio modal-output tinggi. Kedua, pola investasi tidak didasarkan pada prinsip kesetaraan, karena beberapa sumberdaya digunakan di sektor yang ketimpangannya tinggi. Faktanya alokasi investasi di India lebih menitikberatkan pada pertimbangan politik daripada ekonomi.

Tisdell (2003) menyatakan bahwa masuknya Cina ke WTO mengindikasikan kenaikan kenaikan kemiskinan di wilayah perdesaan. Selain itu, bila tidak ada upaya khusus, ketimpangan antara wilayah Cina bagian barat dan bagian timur akan melebar. Selain itu, kantong-kantong kemiskinan baru mungkin timbul di wilayah yang para petaninya bergantung pada pasar.

Tentang keyakinan beberapa pihak bahwa kredit mikro merupakan obat manjur untuk mengentaskan kemiskinan, patut dipertanyakan. Kredit mikro umumnya paling tepat bila kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan arus kas rumah tangga sudah ada (CGAP, 2005:8 dalam Gehlich-Shillabeer, 2008:396). Temuan dari Bangladesh membuktikan bahwa walaupun kredit mikro telah tersedia sejak lama dan tersedia secara luas, banyak orang tidak dapat memperoleh pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhannya. Yang tak boleh terlupakan adalah efek pertumbuhan ekonomi terhadap degradasi lingkungan. Berdasarkan studinya terhadap wilayah Asia Tenggara, Iwami (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai efek positif dan negatif terhadap lingkungan, dan *net effect*nya sulit dinilai secara obyektif. Namun, fakta bahwa emisi CO₂ menunjukkan kurva yang naik menunjukkan situasi yang sedemikian sulit untuk menyesuaikan pertumbuhan ekonomi terhadap solusi pemanasan global. Oleh karena itu negara-negara di Asia Tenggara sebaiknya mempertimbangkan pengenaan pajak karbon bila ingin mengembangkan perekonomiannya.

KESIMPULAN

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Tapi untuk jenis data yang sama, seringkali terjadi inkonsistensi data antarsumber. Inkonsistensi data yang mestinya berasal dari sumber yang sama bisa diminimalkan dengan cara sebelum dicetak dan diedarkan untuk publik, dilakukan cek ulang dengan cara
2. Peringkat tertinggi yang dicapai Kabupaten Pemalang yaitu posisi 6 pada tahun 2006 untuk indikator angka kriminalitas, sedangkan peringkat terbawah (35) ditemukan untuk indikator 1) ketersediaan SLTP, 2) ketersediaan SLTA, 2) rasio guru murid SLTP (ketiganya untuk tahun 2005), 4) rasio puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling (2005 dan 2006), dan 5) persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.
3. Pertumbuhan PDRB yang melambat dari 4,05% (2005) ke 3,72% (2006) memerlukan perhatian serius. Melambatnya pertumbuhan ini diduga berhubungan dengan menurunnya nilai tambah perusahaan besar dan sedang, walaupun nilai investasinya naik.
4. Rasio daya serap tenaga kerja per perusahaan besar dan sedang turun. Menurut data Susenas, rasio penduduk yang bekerja juga turun. Artinya jumlah pengangguran bertambah.
5. Rendahnya persentase perempuan yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta (kurang dari 2%) mengindikasikan bahwa banyak perempuan di Kabupaten Pemalang bekerja di sektor informal. Untuk itu pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi informal lebih tepat.
6. Rendahnya peringkat Kabupaten Pemalang dalam indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik – walaupun sudah mencapai 97,93% – dan seringnya pemadaman listrik, berimplikasi pada perlunya upaya untuk menggunakan energi alternatif, misalnya arus sungai atau pemanfaatan sampah dan tinja. Pemanfaatan sumber energi yang terakhir sekaligus juga mengatasi rendahnya persentase rumah tinggal bersanitasi yang masih 61%.
7. Pendidikan tidak serta merta memutus lingkaran setan kemiskinan karena peran pendidikan dalam pemberantasan kemiskinan sangat tergantung pada jenis pelayanan pendidikan dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah, ketersediaan sekolah, dan rasio guru murid harus disertai kebijakan mengaitkan pendidikan dengan pasar tenaga kerja dan kewirausahaan dan berbasis potensi lokal.
8. Ada kaitan antara penurunan jumlah akseptor KB, kenaikan rata-rata jumlah anak dan meningkatnya rasio ketergantungan. Oleh karena itu pengendalian jumlah penduduk perlu diinternalisasi kepada masyarakat.
9. Kabupaten Pemalang menempati posisi terakhir dalam rasio puskesmas, puskesmas rawat inap,

- puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Oleh karenanya perlu perhatian khusus untuk penambahan fasilitas kesehatan tersebut.
10. Selain yang sudah disebutkan diatas, indikator-indikator yang memerlukan perhatian yaitu :
 - a. Rumah berlantai tanah masih cukup besar di Pemalang (26,3%).
 - b. Luas bangunan ber-IMB pada tahun 2006 hanya 0,0041%.
 - c. Jumlah koperasi aktif menurun walaupun jumlahnya naik, sehingga perlu studi lebih lanjut tentang penyebab ketidakaktifan tersebut.
 - d. Jumlah penduduk ber-KTP 0,750, masih tersisa 25%.
 - e. Sengketa pengusaha-pekerja naik dari 10,8 per 1000 perusahaan menjadi 28,1.
 - f. Perpustakaan kurang terdokumentasi.
 - g. Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan kurang terdokumentasi.
 - h. Pelanggan PDAM terus menurun dari 6,2 per 100 rumah tangga ke 5,8 dan 5,5.
 11. Indikator-indikator berikut menggembirakan, tapi sebaiknya terus ditingkatkan :
 - a. Rata-rata kelompok binaan LPM naik dari 5 menjadi 7 (2006-2007).
 - b. Peringkat angka kriminalitas naik dari peringkat 11 ke 6.
 - c. Lulusan S1/S2/S3 naik dari 40,26 per 10.000 menjadi 139,71 naik dari 35 ke 18.
 - d. Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan naik pesat dari 37% ke 59%, padahal pada periode yang sama persentase tersebut di Jawa Tengah hanya naik dari 43% ke 53%. Kenaikan ini melambangkan membaiknya kesejahteraan penduduk.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2008. Jawa Tengah dalam Angka 2007. Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dao, Minh Quang. 2004. Rural Poverty in Developing Countries: An Empirical Analysis. *Journal of Economic Studies*. Vol.31 No.6 hal. 500-508.
- De Silva, Indunil. 2008. Micro-level Determinants of Poverty Reduction in Sri Lanka: a Multivariate Approach. *International Journal of Social Economics*. Vol. 35 No.3 hal. 140-158.
- Fourie, Johan. 2007. The South African Poor White Problem in the Early Twentieth Century Lessons for Poverty Today. *Management Decision* Vol.45 No.8 hal. 1270-1296.
- Gehlich-Shillabeer, Mareen. 2008. Poverty Alleviation or Poverty Traps? Microcredits and Vulnerability in Bangladesh. *Disaster Prevention and Management* Vol.17 No.3 hal. 396-409.
- Ghosh, B.N. 2002. Allocative Efficiency and Rural Poverty in India. *International Journal of Social Economics* Vol.29 No.1/2 hal. 87-96.
- Ismail, Rahmah. 2000. Educational and Income Inequality in Malaysia. *Humanomics* Vol. 16 (2) hal. 19-40.
- Iwami, Toru. 2001. Economic Development and Environment in Southeast Asia: An Introductory Note. *International Journal of Social Economics* Vol.28 No.8 hal. 605-622.
- Khan, S.I. 2000. Gram Bangla Model for Poverty Alleviation and Self-Reliance. *International Journal of Social Economics*. Vol. 27 No. 7/8/9/10 hal. 878-892.
- Mulford, Bill, Diana Kendall, John Ewington, Bill Edmunds, Lawrie Kendall, Halia Silins. 2007. Successful Principals of High-Performance Schools in High-Poverty Communities. *Journal of Educational Administration*. Vol. 46 No. 4 hal. 461-480.
- Zhang, Xiaobo dan Shenggen Fan. 2000. Public Investment and Regional Inequality in Rural China. *Environment and Production Technology Division (EPTD) Discussion Paper* No.71. International Food Policy Research Institute. Washington.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011*, Pemkab Pemalang.
- Anonim. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- BPS Kabupaten Pemalang. 2007. *Kabupaten Pemalang dalam Angka 2006*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang.
- BPS Kabupaten Pemalang. 2008. *Kabupaten Pemalang dalam Angka 2007*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2007. *Jawa Tengah dalam Angka 2006*. Kerjasama Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

